

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kesejarahan, konstelasi hubungan bilateral Iran dan Amerika Serikat mengalami dua fase perubahan yang sangat mencolok. Pada awalnya, Iran dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang dekat, akan tetapi kini keduanya menjadi dua negara yang saling bermusuhan. Selain itu, dalam perkembangannya, hubungan keduanya yang memanas sejak hampir tiga dekade yang lalu seakan-akan merepresentasikan panasnya hubungan antara dua peradaban besar, Islam dan Barat. Keberanian Iran dalam menentang hegemoni Amerika Serikat dan Barat menginspirasi bangkitnya perlawanan umat Islam di berbagai wilayah di Timur Tengah terhadap pada penjajah asing seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina.

Pada era Perang Dingin, Timur Tengah adalah arena pertarungan yang paling strategis bagi kedua negara *super power* ketika itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Paling tidak ada tiga alasan mengapa demikian: *pertama*, wilayah itu berbatasan langsung dengan Uni Soviet, sehingga oleh Amerika Serikat dimanfaatkan sebagai tameng terdepan untuk membendung komunisme Uni Soviet. *Kedua*, wilayah itu memiliki sumber daya minyak yang melimpah sehingga di samping secara ideologis, Amerika dan Uni Soviet juga bersaing secara ekonomi untuk menguasai sumber minyak terbesar di dunia tersebut.

Ketiga, intensitas perbedaan di wilayah itu sangat tinggi dan sering terjadi konflik antarnegara. Hal ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk bersaing secara militer dengan mengadu domba dan berpihak pada salah satunya.¹

Iran Merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah pada era tersebut. Hubungan antara kedua negara ini terjalin sangat erat dan saling menguntungkan. Di samping untuk kepentingan melawan Soviet, Iran juga memiliki arti penting bagi Amerika Serikat sebagai perimbangan kekuatan dengan Arab. Sejak lama, negara bangsa Persia ini memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang berasal dari etnik Arab. Sedangkan negara-negara Arab saling bahu-membahu berperang melawan Israel yang merupakan sekutu "abadi" AS agar keluar dari tanah Palestina.

Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah sejak akhir Perang Dunia II disebabkan oleh keinginan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di wilayah yang strategis dan kaya minyak tersebut.² Pada perkembangannya, Iran memainkan isu Perang Dingin dengan baik untuk kepentingan-kepentingannya. Shah Iran mendesak Amerika Serikat untuk memberikan bantuan dengan dalih pembangunan ekonomi dan terutama militer guna menghadapi ancaman Uni Soviet. Dengan dana yang mengucur dari AS serta lonjakan pendapatan minyak tersebut, penguasa Iran melakukan pembangunan dan modernisasi besar-besaran.

¹.Cecep Zakarias El Bilad, *Pasang Surut Hubungan As - Iran*, dalam <http://zakariaelbilad.multiply.com/journal/item/24>

².Smita Notosusanto, mengutip Stephen Ambrose dalam *Rise to Globalism* (New York: Penguin Books, 1986) hlm. 262. *Global Jurnal Politik Internasional*, Vol. 2, hal. 15.

Modernisasi dan pembangunan infrastruktur, bisnis, industri, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan militer ternyata tidak berpengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan. Semuanya ini tidak mampu menutupi fakta tentang pemerintahan yang represif dan korup. Kondisi semacam ini menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat tinggi sehingga memicu radikalisme rakyat. Dalam kondisi sosial yang akut, satu-satunya pihak yang dapat merangkul dan mengayomi masyarakat adalah ulama. Masjid dan madrasah menjadi pusat penggemblengan spiritual dan moral masyarakat. Di samping itu, masjid ketika itu juga berfungsi sebagai tempat diskusi masyarakat dengan ulama mengenai kondisi sosial dan pemerintah. Akhirnya, masjid dijadikan sebagai pusat pembangunan kekuatan untuk menurunkan penguasa represif Shah Pahlevi. Ulama yang sejak 1920 konsisten dan tegas melawan pemerintah ketika itu adalah Ayatullah Khomeini.

Kekecewaan, kemarahan, dan protes rakyat atas penguasa monarki semakin terakumulasi dan memuncak pada Desember 1979. Dua juta lebih rakyat Iran turun ke jalan memprotes Shah dan menuntutnya untuk mengundurkan diri. Demonstrasi ini berakhir Shah Pahlevi melarikan diri ke luar negeri, dan kembalinya Sang Imam, Ayatullah Khomeini, setelah diasingkan ke luar negeri selama 15 tahun oleh Shah. Monarki pun runtuh, dan di bawah komando langsung Ayatullah Khomeini negeri itu bertransformasi menjadi Republik Islam Iran. Rakyat Iran menyambut Revolusi Islam tersebut dengan penuh antusias dan penuh harapan terhadap masa depan yang lebih baik.

tentunya kepada Sang Pemimpin Revolusi Ayatullah Khomaini. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintahan Iran berjalan di bawah dominasi dan hegemoni para mullah. Amerika Serikat menyambut revolusi yang terjadi dengan sangat cepat tersebut dengan penuh kekhawatiran. Akan tetapi nasib kedekatan kedua negara itu tidak lama kemudian menjadi jelas setelah beberapa saat kemudian Ayatullah Khumaini menjuluki Amerika Serikat sebagai *Setan Besar* dan Uni Soviet sebagai *Setan Merah*.

Walaupun terjadi gejolak di Timur Tengah dengan hadirnya Iran sebagai ancaman baru, Washington masih belum menempatkan isu Iran ini pada urutan prioritas politik luar negerinya. Amerika masih harus mengurus energinya untuk menghadapi dan menaklukkan musuh besarnya, Uni Soviet. Oleh karena itu, untuk menangani Iran, AS tidak perlu melakukan konfrontasi langsung dengan Iran. Ketika Irak menginvasi Iran pada 22 September 1980 hingga 1988, AS memberikan dukungan penuh kepada Irak dalam bentuk suplai data intelejen, bantuan ekonomi dan persenjataan. Tidak hanya itu, AS juga menggandeng negara-negara Teluk dan Barat untuk mendukung Irak. Saudi Arabia, misalnya, telah menyalurkan bantuan tidak kurang dari 30,9 miliar dolar AS untuk membeli persenjataan super canggih AS. Kuwait dan Uni Emirat Arab masing-masing menyumbangkan tidak kurang dari 10 miliar dolar AS.³

Krisis Teluk membuat konsentrasi Amerika belum tertuju pada Iran. Hal ini didukung kondisi domestik Iran sendiri yang sejak 1989 hingga 1997 dipimpin oleh Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Di bawah kepemimpinannya, Iran mulai melakukan rekonsiliasi dengan dunia internasional. Walaupun dari kalangan ruhaniawan senior (konservatif), akan tetapi Rafsanjani berpandangan moderat. Rafsanjani mengawali era keterbukaan Iran dengan dunia internasional termasuk dengan Amerika setelah sepuluh tahun terisolasi sejak Revolusi 1979. Proses rekonsiliasi ini kemudian diteruskan dan bahkan dipercepat oleh Presiden Muhammad Khatami (1997-2005).

Sebenarnya, krisis AS-Iran adalah krisis warisan yang telah ada semenjak Pemerintahan Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Clinton, maupun George W. Bush. Krisis yang telah terbuka sejak tujuh belas tahun setelah diplomat-diplomat AS ditawan di Teheran. Semenjak saat itu, Amerika Serikat terus-menerus mempertahankan kondisi darurat nasional dengan Iran, memutus hubungan diplomatik dengan Teheran pada 1980, dan di tahun 1984 menempatkan Iran dalam daftar pendukung terorisme.⁴ Hal ini berlanjut ketika Presiden AS George W. Bush.

Setelah krisis Teluk berakhir, kepemimpinan George H. W. Bush sebagai presiden Amerika Serikat yang realis berakhir, dan kursi kepresidenan diduduki oleh Bill Clinton (1992-2000) dari Partai Demokrat yang cenderung berpaham

⁴ M. Luqman Alieff, *Barung Nuhlik?*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2008, hal. 14

liberal internationalism. Kebijakan luar negerinya diarahkan pada upaya-upaya penciptaan perdamaian dengan jalur diplomatis. Penurunan tensi ketegangan antara Iran-Amerika sejak kurang lebih satu dekade berhenti. Pemilu Presiden 2001 menghantarkan kembali kaum neo-konservatif ke tampuk pemerintahan AS. Dalam pidato kenegaraan di depan Kongres akhir Januari 2002, Presiden George W Bush menegaskan bahwa bersama Irak dan Korea Utara, Iran adalah "*axis of evil*". Ketegangan antarkedua negara semakin memuncak dan situasi di Timur Tengah kembali memanas ketika Iran pada 28 Juni 2005 kembali dipimpin oleh seorang tokoh konservatif garis keras Mahmoud Ahamadinejad. Presiden baru Republik Islam Iran ini mengambil langkah politik yang berlawanan dengan Amerika. Dia juga sering mengeluarkan komentar pedas menyerang kepentingan AS dan sekutu Timur Tengahnya Israel. Hubungan AS-Iran yang memburuk sejak revolusi Islam Iran 1979 semakin meruncing dengan kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan George W. Bush atas dakwaan pengayaan Uranium Iran untuk program teknologi Pembangkit Nuklir di bawah Presiden Iran Ahmadinejad.⁵

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, isu baru yang kemudian menjadi sangat sentral dalam kelanjutan hubungan kedua negara adalah isu pengembangan teknologi nuklir Iran. Isu ini menjadi sangat kontroversial karena

juga memiliki dan mengembangkan senjata nuklir menjadi pelopor utama penentang Pemerintah Iran yang tetap pada sikapnya dalam pengembangan teknologi nuklir tersebut. Iran yang sejak Revolusi Islam, oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara “poros setan” bersama Libya dan Korea Utara karena radikalisme-fundamentalisnya berdiri tegak dengan alasan – alasannya yang tegas. Pemerintah Iran berpendirian bahwa pengembangan teknologi, termasuk teknologi nuklir adalah hak setiap negara dan warganya, dengan tujuan apapun. Pemerintah Teheran kemudian mempertegas tujuan pengembangan teknologi nuklir tersebut dengan berkali – kali mengatakan bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai (*aim to peace*), akan tetapi, negara – negara barat, khususnya Amerika tidak bisa percaya begitu saja. Amerika Serikat dengan isu–isu yang dilemparkannya ke forum dan media – media internasional bahwa pengembangan nuklir Iran tersebut mengarah pada pengembangan senjata pemusnah massal yang (*mass killer’s weapon*) yang dapat menyebabkan *security dilemma* dan mengancam perdamaian di Timur Tengah. Ini bisa menyulut api perang, di mana kita ketahui bahwa kondisi Timur Tengah sedang labil akibat konflik Arab-Palestina yang masih terus berlanjut.⁶

Di bawah kepemimpinan Ahmadinejad, Iran menjelma sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat, AS dan kroninya. Ahmadinejad dengan kemandirian negara dan perjuangan mengawal ruh revolusi Islam Iran tahun

⁶.”Power Politik Iran Dan Kebijakan Luar Negeri Anti Amerika”, dalam

1979.⁷ Banyak kemajuan Iran di bidang sains dan teknologi dicapai pada masa kepemimpinan Ahmadinejad. Gagasan revolusioner tentang pembangunan Negara berdasar energy nuklir dikukuhkan pada 9 April 2007. Pada tanggal tersebut kemudian oleh pemerintahan Republik Islam Iran secara resmi dikukuhkan sebagai Hari Nasional Energi Nuklir. Berangkat dari persoalan inilah yang menjadi pemantik perseteruan yang tidak pernah terselesaikan dalam konstalasi hubungan AS-Iran hingga saat ini (2011).

Sehubungan dengan program pengembangan teknologi nuklir Iran, Presiden Ahmadinejad, menegaskan bahwa teknologi ini bertujuan "damai" dan tidak akan mengancam pihak manapun. Iran tidak akan menyebabkan ketidakadilan bagi setiap orang dan bangsa lain, sementara pada saat yang sama Iran tidak akan tunduk kepada ketidakadilan melalui politik hegemoni Barat. Bagi negara Iran, penguasaan teknologi nuklir sangat strategis guna pengembangan dan kemajuan negara mereka. Kebijakan politik luar negeri Iran, terkait dengan krisis Nuklirnya, berhasil mengubah persepsi dunia akan pola superioritas AS.

Naiknya presiden Amerika Serikat Barrack Obama sebagai presiden Amerika Serikat, membawa harapan membaiknya hubungan bilateral Iran-AS. Slogan *Change we believe* yang didengungkan oleh Obama berikut partai Demokrat dan para pendukungnya, seolah-olah menjadi angin segar akan prospek positif kedepan bagi kawasan Timur Tengah, khususnya Iran. Pada tanggal 6

⁷ Muhammad Alaeff, *Revolusi Nuklir? Jakarta: Zebra Publikasi House, 2008*, hal. 47

Maret 2009 Presiden Obama menawarkan sebuah 'era baru' (*the new beginning*) bagi hubungan bilateral kedua belah Negara.⁸ Dalam sebuah pidato singkat, Obama menyatakan akan berusaha berkomunikasi dengan para pemimpin Iran berikut penduduk Iran demi mencipta sebuah perbaikan bilateral. Hal ini jelas mengejutkan dunia, khususnya Iran sendiri yang selama 30 tahun mengalami embargo ekonomi oleh adikuasa tersebut. Menyusul tawaran Obama, Presiden Mahmoud Ahmadinejad menyatakan siap untuk berunding dengan Amerika Serikat. Hal ini dia sampaikan dalam sebuah pidato sambutan dalam peringatan Revolusi Islam Iran ke-30 pada tanggal 12 Februari 2009 di Tehran. Lebih lanjut lagi, Menteri Luar Negeri Iran Manoucher Motakki mengaffirmasi itikad tersebut dengan menekankan perlunya sebuah 'dialog yang fair' antara kedua belah Negara.⁹

Namun demikian, harapan akan adanya perdamaian antar dua negara tersebut menjadi sirna ketika Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-65 pada tanggal 23 September 2010. Dalam pidato itu, Mahmoud Ahmadinejad menggunakan berbahasa Farsi yang diawali dengan doa singkat berbahasa Arab itu menyinggung sejumlah isu penting global. Bencana banjir bandang di Pakistan, krisis global dan imperialisme akibat keserakahan segelintir negara

⁸ "Prospek Hubungan Bilateral Iran-As: Change We Don't Believe In", dalam

adidaya, terorisme, peristiwa 11 September 2001, Palestina, penistaan terhadap kitab suci al-Quran, reformasi PBB dan deklarasi nuklir Tehran menjadi sorotan pidato Presiden Iran. Mahmoud Ahmadinejad juga mengemukakan sejumlah usulan konstruktif mengenai solusi krisis global termasuk masalah nuklir.

Dalam pernyataannya itu pula Ahmadinejad menginginkan PBB agar membentuk Komite pencari fakta untuk menyelidiki insiden 11 September tersebut. Mahmoud Ahmadinejad mengatakan bahwa beberapa orang di Pemerintahan Amerika Serikat merupakan dalang dari penyerangan tersebut yang bertujuan untuk menaikan perekonomian AS yang sedang menurun. dan selain itu, insiden tersebut sebagai alasan untuk menekan Timur Tengah demi kepentingan rezim zionis.¹⁰ Apalagi, masyarakat dari berbagai keyakinan dan etnis menilai insiden itu sebagai tragedi yang sangat memilukan.

Terkait dengan pidato Ahmadinejad tersebut, Obama mengatakan bahwa pernyataan Ahmadinejad bertolak belakang dengan simpati yang diberikan oleh masyarakat Iran sesaat setelah peristiwa 11 September. Akibat pernyataan Ahmadinejad tersebut, delegasi Amerika Serikat langsung *walk-out* dari ruang sidang saat Ahmadinejad tengah berpidato. Diikuti oleh delegasi negara-negara Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Korea Utara. Kondisi ini tentu

saja akan membawa perubahan lagi dalam hubungan Iran dengan Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT DENGAN IRAN PASCA PIDATO MAHMOUD AHMADINEJAD PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB KE-65

B. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan yang perlu penulis teliti dan analisis lebih lanjut yaitu :

Bagaimanakah Dinamika Perang Statement Amerika Serikat dan Iran pasca pidato Mahmoud Ahmadinejad pada Sidang Majelis Umum PBB ke-65?

C. Tujuan penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran pasca sidang majelis umum PBB ke-65 Tahun 2010.
2. Untuk menganalisis dampak positif dan negative hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran pasca sidang majelis umum PBB ke 65

D. Kerangka Teori

Teori didefinisikan sebagai serangkaian dari konsep-konsep yang saling berhubungan, bersama-sama dengan definisi-definisi, hukum-hukum, pernyataan-pernyataan dan aksioma-aksioma. Dari hubungan antara beberapa variabel, teori akan menampilkan hipotesa-hipotesa yang bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.¹¹ Untuk membantu dalam menganalisis permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori politik luar negeri serta analisis framing sebagai kerangka atau unit analisis.

I. Teori Politik Luar Negeri

Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional suatu negara yang melaksanakannya dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional. Menurut Jack C.Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

"...strategy planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest."¹²

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan, tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan

¹¹. James E. Dougherty & Robert L.Pfaltzgraff, Jr, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Terjemah oleh M.Amien Rais, harwanto Dahlan & Tulus Warsito, Yogyakarta, Fisipol UMY, 1994, hal 26-27

¹². J. J. C. Plano dan Roy Olton, "The International Relations Dictionary", Holt Rinehart Winston, INC

politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut: (1) *self preservation* yaitu hak untuk mempertahankan ekstensi diri; (2) *Independence* yang berarti Mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada negara lain secara fisik maupun ekonomi; (3) *militer security* yaitu keamanan militer yaitu tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *territorial integrity* keutuhan wilayah nasional; dan (5) *economic wellbeing*, yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan orientasi kebijakan luar negeri antara Amerika Serikat dengan Iran mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan tersebut sangat tergantung pada kondisi yang terjadi antara dua negara yang mengikutinya. Pada awalnya hubungan Iran dengan Mareka sangat harmonis karena didukung dengan situasi atau kondisi Amerika Serikat yang menempatkan Iran sebagai sekutu utama AS di Timur Tengah pada PD II. Hal ini kemudian berubah pada saat atau pasca revolusi Iran, khususnya pada Irak menginvasi Iran pada 22 September 1980 hingga 1988, AS memberikan dukungan penuh kepada Irak dalam bentuk suplai data intelejen, bantuan ekonomi dan persenjataan. Hubungan Iran dengan Amerika Serikat

Orientasi kebijakan luar negeri kedua negara juga nampak pada saat Bill Clinton (1992-2000) dari Partai Demokrat yang cenderung berpaham liberal internationalism menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, dimana kebijakan luar negerinya diarahkan pada upaya-upaya penciptaan perdamaian dengan jalur diplomatis. Penurunan tensi ketegangan antara Iran-Amerika sejak kurang lebih satu dekade berhenti. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama manakala pada pemilu Pemilu Presiden 2001 Presiden George W Bush menjadi presiden dan menegaskan bahwa bersama Irak dan Korea Utara, Iran adalah "*axis of evil*". Kondisi tersebut membawa dampak pada ketegangan antar kedua negara kembali memuncak. Konstelasi hubungan Iran dengan Amerika Serikat yang mengalami pasang surut tersebut sangat didukung oleh kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan disini yang penulis maksudkan adalah kondisi politik antara kedua negara tersebut.

Ketika Ahmadinejad menjadi presiden Iran, ternyata hubungan Iran dengan Amerika menjadi semakin memanas. Langkah politik yang berlawanan dengan Amerika serta komentar pedas yang sering dilontarkan Ahmadinejad guna menyerang kepentingan AS dan sekutu Timur Tengahnya Israel juga membuat hubungan antara kedua negara ini menjadi tidak harmonis.

Sebenarnya hubungan Iran dan Amerika menunjukkan arah yang lebih baik dan kondusif manakala Amerika Serikat dipegang oleh Barrack Obama yang membawa harapan membaiknya hubungan bilateral Iran-AS dengan slogan *Change we believe*. Pada tanggal 6 Maret 2009 dalam sebuah pidato singkat

Obama menyatakan akan berusaha berkomunikasi dengan para pemimpin Iran berikut penduduk Iran demi mencipta sebuah perbaikan bilateral. Kondisi ini membawa angin segar dan positif dalam hubungan antara kedua negara tersebut. Namun demikian ternyata hal ini tidak menunjukkan kondisi seperti yang diharapkan sehubungan dengan sikap atau pidato Mahmoud Ahmadinejad pada sidang Majelis Umum PBB ke-65 pada tanggal 23 September 2010, dimana dalam pidatonya sehubungan dengan Amerika Serikat, Ahmadinejad menyoroti beberapa hal seperti masalah imperialisme akibat keserakahan segelintir negara adidaya, terorisme, peristiwa 11 September 2001, dan deklarasi nuklir Tehran dimana Amerika Serikat sangat menentang terhadap pengembangan nuklir Iran.

Terkait dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa politik luar negeri Iran khususnya terhadap Amerika Serikat, ditujukan untuk : pertama, *self preservation* yaitu hak untuk mempertahankan ekstensi diri sebagai negara merdeka yang berhak melakukan apapun di dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain. Kedua, *Independence* yang berarti mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada negara lain secara fisik maupun ekonomi. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh Ahmadinejad terutama dalam melawan Amerika Serikat merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemandirian negara dan perjuangan mengawal ruh revolusi Islam Iran tahun 1979. Terkait dengan penguasaan teknologi nuklir, merupakan hal yang sangat strategis guna pengembangan dan kemajuan negara mereka. Kebijakan politik luar negeri Iran, terkait dengan krisis nuklirnya, telah

berhasil menaruh perhatian dunia akan pada superioritas AS. Ketiga, economic

wellbeing, yaitu adanya kesejahteraan ekonomi, dimana dalam hal ini Ahmadinejad menentang Amerika Serikat dalam hal pengembangan nuklir Iran. Ahmadinejad beranggapan bahwa teknologi Nuklir sangatlah efektif untuk kemandirian nasional. Di bidang kedokteran misalnya, teknologi Nuklir memainkan peranannya yang tidak dapat dipungkiri, untuk menentukan dan mendiagnosis sejumlah penyakit serta penyembuhannya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, juga dalam kedokteran hewan, bahan-bahan radio aktif nuklir mampu untuk meningkatkan mutu hewan. Untuk itulah rakyat Iran bergeming dengan slogannya “Energi hasteh’i haqqi musallomi mo” (Energi Nuklir adalah hak kami yang sah).¹³ Sehubungan dengan pidato Mahmoud Ahmadinejad dan reaksi Amerika Serikat atas pidato tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis *framing*.

II. Analisis *Framing*

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan frame

¹³ Muhammad Ajeff, *Perang Nuklir?* Jakarta: Zebra Publishing House, 2008, hal 47

sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.¹⁴

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media.¹⁵ Jadi dalam penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas/peristiwa dikonstruksi oleh media. Menurut Peter L. Berger, dalam analisis framing, manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilannya.¹⁶ Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan, yang oleh Berger disebut dengan momen atau peristiwa. Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Ketiga, internalisasi, dimana proses internalisasi lebih merupakan

Al-Quran, reformasi PBB dan deklarasi nuklir Tehran. Pidato berdurasi 45 menit tersebut diliput oleh berbagai media massa internasional dan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional Iran mulai pukul 23.00 waktu Tehran. Pidato berbahasa Farsi yang diawali dengan doa singkat berbahasa Arab itu menyinggung sejumlah isu penting global. Bencana banjir bandang di Pakistan, krisis global dan imperialisme akibat keserakahan segelintir negara adidaya, terorisme, peristiwa 11 September 2001, Palestina, penistaan terhadap kitab suci al-Quran, reformasi PBB dan deklarasi nuklir Tehran menjadi sorotan pidato Presiden Iran. Ahmadinejad juga mengemukakan sejumlah usulan konstruktif mengenai solusi krisis global termasuk masalah nuklir. Ahmadinejad mengusulkan tahun 2011 sebagai Tahun Perlucutan Senjata Nuklir, dengan slogan, "Energi Nuklir Untuk Semua, Senjata Nuklir Tidak Untuk Siapapun." Ahmadinejad dalam pidatonya di hadapan ratusan pemimpin dunia mendesak PBB dan publik dunia supaya melucuti senjata nuklir di dunia yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara maju dan rezim Zionis.¹⁸

Pidato Ahmadinejad dalam sidang umum PBB tersebut ternyata secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada pembentukan pandangan politik, kebijakan dan wacana baik bagi Amerika Serikat sendiri maupun masyarakat Iran. Pembentukan politik yang nampak secara langsung

¹⁸ "Obama dan Ahmadinejad Berhadapan di Sidang PBB" dalam <http://metrotvnews.com>

pada saat pidato Ahmadinejad adalah pada sikap delegasi Amerika Serikat langsung *walk-out* dari ruang sidang saat Ahmadinejad tengah berpidato. Reaksi yang ditunjukkan oleh Amerika tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap hubungan Iran dengan Amerika kedepannya yaitu akan semakin mempersulit jalan damai antara kedua belah pihak. Di Iran sendiri sebenarnya sikap keras Ahmadinejad menimbulkan pro dan kontra dari golongan atau kubu konservatif dan moderat. Hal tersebut dipengaruhi sikap politik luar negeri yang sejauh ini diekspresikan Ahmadinejad, sebagaimana tecermin dalam pernyataan politik luar negerinya yang cenderung keras. Hal ini memunculkan kekhawatiran sebagian rakyat Iran yang berpandangan politik moderat, terutama menyangkut posisi strategis Iran dalam konstelasi politik global dan regional. Berbagai pertanyaan politik Ahmadinejad yang cenderung keras, dapat berdampak negatif pada posisi negara Iran dalam peta strategis dan kerja sama politik-ekonomi global. Pernyataan itu dapat memperburuk relasi Teheran dengan beberapa negara Eropa, yang sebelumnya menunjukkan gejala membaik. Jika terus berlanjut, oleh kalangan moderat dan reformis, sikap Ahmadinejad dikhawatirkan akan menarik mundur capaian positif Iran dalam komunikasi serta kerja sama politik global selama ini.

Seperti diketahui, pada dua pemerintahan sebelumnya di bawah Rafsanjani dan Mohamad Khatami (1997-2005), Iran berkonsentrasi pada upaya pemulihan hubungan politik-ekonominya dengan beberapa negara Eropa. Bahkan dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu relatif berhasil digapai. Hanya saja, dua

pemerintahan itu relatif gagal dalam mewujudkan agenda ekonomi dalam negeri. Sehingga kurang mendapat simpati kalangan menengah bawah, yang terbukti banyak berkontribusi suara pada kemenangan Ahmadinejad. Kuatnya suara kelompok pemilih pada tingkat ini membuktikan kegagalan pemerintahan moderat-reformis Iran pada sektor peningkatan taraf ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori yang sudah penulis paparkan di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- Respon publik dan Pemerintah Amerika Serikat pasca pidato Ahmadinejad pada Sidang Umum PBB cenderung meningkatkan Sentimen negatif publik pemerintah Amerika Serikat terhadap Iran.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dimana dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), sehingga data yang dihasilkan berupa data sekunder yang

di peroleh melalui pengumpulan data yang diambil dari buku-buku literatur

laporan-laporan hasil penelitian, jurnal, majalah, dokumen, surat kabar, dan lain-lain (data sekunder) yang relevan dengan penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran pasca sidang Majelis Umum PBB ke-65.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Mendeskripsikan mengenai gambaran umum tentang Hubungan Iran dan Amerika Serikat sebelum Sidang Majelis Umum PBB ke-65.

Bab III Mendeskripsikan Pidato Mahmoud Ahmadinejad Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-65 dan sikapnya teradap Amerika Serikat

Bab IV Pengaruh Pidato Ahmadinejad terhadap hubungan bilateral Amerika

Bab V Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya